



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SIARAN PERS

Jalan Sao-Sao Nomor 10 Kendari, Sulawesi Tenggara

Telepon +62 811-4151-106

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Raih WTP-PSH, Ini Penekanan dari BPK

Kendari – Humas BPK

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Senin (26/5/2025). Anggota IV BPK **Haerul Saleh, S.H., CRA, CRP, CIABV, CSFA, CertDA, CFrA** menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 pada acara Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara **La Ode Tariaia, S.Pd.** dan Gubernur Sulawesi Tenggara **Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH)**. Opini diberikan berdasarkan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), yang menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. **Penekanan Suatu Hal** yang perlu menjadi perhatian yaitu penerbitan SP2D yang tidak sepenuhnya memperhatikan ketersediaan dana riil sehingga belanja pada Tahun 2024 menjadi utang yang membebani belanja Tahun 2025.

“Kami mengucapkan selamat karena opini WTP tersebut merupakan buah kerja keras dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel” kata Anggota IV BPK RI.

Meski berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 Tahun terakhir, BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi opini dimasa akan datang. Diantara permasalahan yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain:

- Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD tidak sepenuhnya memperhatikan ketersediaan dana riil, menyebabkan belanja tidak dapat dibayarkan pada Tahun 2024 dan menjadi utang yang membebani Tahun 2025

- Kekurangan Kas Dana BOS-P sebanyak Rp433 juta di lima satuan pendidikan belum dapat dipertanggungjawabkan hingga akhir tahun; dan
- Sejumlah Aset Tanah dikuasai pihak lain atau dalam status sengketa, yang berisiko menghambat pemanfaatan untuk pelayanan publik.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah

Selain LHP, BPK juga menyerahkan **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024**, yang memuat ringkasan pemeriksaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sultra. IHPD diharapkan menjadi bahan penting bagi gubernur dalam fungsi pembinaan ke kabupaten/kota serta bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Hingga Semester II Tahun 2024, Pemprov Sultra telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 77,95%, namun masih berada di peringkat terakhir dari 18 entitas di wilayah Sultra dalam hal progres penyelesaian. BPK menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Anggota IV BPK RI menutup sambutan dengan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus berkontribusi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, perbaikan gini ratio, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BPK RI menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan dan kerja sama selama proses pemeriksaan. Semoga capaian ini menjadi motivasi bersama untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Contact Person :

Ade Rachman

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara